

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran merupakan salah satu isu krusial yang terus menjadi perhatian di Indonesia, dimana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran, namun permasalahan ini masih menjadi tantangan yang kompleks.(Putra dkk, 2016)

Pengangguran dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan, selain itu pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, dan perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan dan dimana pengangguran yang tinggi berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah sosial yang juga semakin meningkat, maka penting untuk mengetahui bagaimana bentuk responsivitas dalam mengatasi pengangguran.

Responsivitas adalah bentuk daya tangkap dan kemampuan pemberi pelayanan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini

mengukur daya tangkap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat pengguna layanan.

Pengangguran dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan, selain itu pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, dan perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan dan dimana pengangguran yang tinggi berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah sosial yang juga semakin meningkat seperti yang terjadi di provinsi Aceh saat ini.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Pengangguran di provinsi aceh terus meningkat seiring berjalannya waktu, pengangguran ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar di provinsi aceh, dimana pengangguran yang tinggi akan berdampak terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah terkait dengan ekonomi yang semakin meningkat. Dengan demikian jumlah angkatan kerja yang cukup besar, dan dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, yang membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut semakin rumit seiring adanya konflik antara pengusaha dan pekerja terkait dengan upaya yang mereka peroleh, dan tingkat inflasi yang cenderung naik (Aziz, 2024).

Pengangguran di Provinsi Aceh saat ini tentunya bukan hanya pada tataran pusat saja tetapi daerah juga mengalami masalah yang kursial terhadap

pengelolaan dan penanganan angka pengangguran di daerah seperti halnya yang dialami oleh Kabupaten Bireuen. Hal ini disebabkan tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup bagi usia yang memasuki masa berkerja, jika terus dibiarkan hal ini tentu saja akan menimbulkan sejumlah permasalahan lainnya seperti kriminalitas yang meningkat dan SDM yang tidak digunakan dengan produktif. pengangguran ini masalah yang harus cepat ditanggulangi demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” pada dasarnya manusia berhak mempunyai pekerjaan karena bekerja merupakan wabah bagi warga negara untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri serta demi kelangsungan kehidupan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran. Lapangan kerja yang tersedia merupakan bagian kesatuan dari seluruh program Pembangunan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri mampu masyarakat. Dalam pasal 4 UndangUndang Ketenagakerjaan (UUK) menjelaskan (1) tenaga kerja yang diberdayakan dan digunakan secara optimal menjadi tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan, (2) pembangunan nasional serta daerah agar terwujud maka, dibutuhkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang merata, (3) kesejahteraan diwujudkan ke dalam bentuk pemberian perlindungan kepada

Tenaga Kerja dan (4) kesejahteraan keluarga pekerja dan dirinya sendiri harus ditingkatkan (Willdan, 2020).

Qanun Aceh No 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, dimana upaya-upaya pemerintah Aceh dalam mengatasi pengangguran dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja dan pemagangan yang diselenggarakan dalam program BLK (Balai Latihan Kerja) dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan ataupun skill para angkatan kerja.

Berdasarkan informasi Media Massa, Berdasarkan survei angkatan kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terserap oleh pasar kerja di Bireuen mencapai 4,14 persen. Sehingga pengangguran di Bireuen kebanyakan berasal dari umur produktif setelah menyelesaikan sekolah menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, Dinasakertran Kabupaten Bireuen terus berupaya mengurangi potensi pengangguran, dimana upaya dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pemagangan, dan peluasan kesempatan kerja (AJNN.net Kamis 6 juni 2024). (Azri, 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal, naik turunnya angka pengangguran dimana masyarakat tingkat pendidikannya rendah yang tidak mempunyai keahlian khusus, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi tentang usaha kerja dan kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan dinas tenaga kerja sudah melakukan pelatihan-pelatihan dan membuat program Balai Latihan Kerja (BLK), seperti pelatihan sepeda motor, membuat kue, menjahit dan pelatihan grafis, pelatihan yang berlangsung di UPTD Balai Latihan

Kerja (BLK) Desa Beunyot Kecamatan Juli untuk mengurangi angka pengangguran dimana masyarakat kurang informasi terhadap pelatihan-pelatihan tersebut dan masyarakat kurang membuka web info terhadap pelatihan tersebut. (Wawancara awal, Senin 19 Agustus 2024).

Kabupaten Bireuen terdapat 17 kecamatan dengan jumlah penduduk 453.242 jiwa yang terdiri atas 224.053 jiwa penduduk laki-laki dan 229.189 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah penduduk tersebut Kabupaten Bireuen mendapatkan kepadatan penduduk mencapai 252 jiwa/km dari 17 kecamatan, kepadatan penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Kota Juang dengan sebesar 2.888 jiwa/km dan terendah di kecamatan Pandrah sebesar 81 jiwa/km. Dengan kepadatan penduduk tersebut terlihat semakin meningkatnya angkatan kerja sehingga menimbulkan bertambahnya pengangguran di setiap tahunnya di Kabupaten Bireuen.

Pengangguran di Kabupaten Bireuen di setiap tahunnya masih mengalami naik turunnya angka pengangguran, pengangguran terjadi karena minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya akses masyarakat terhadap informasi tentang usaha kerja. Apabila permasalahan tersebut terus terjadi maka dapat menyebabkan masyarakat susah untuk mencari pekerjaan. Dinas tenaga kerja sudah membuat Balai Tenaga Kerja (BLK) di Kabupaten Bireuen yang ada di kecamatan Juli tetapi masih banyak masyarakat tidak mengetahui pelatihan tersebut karena kurangnya informasi bagi masyarakat. Dari itu dinas tenaga kerja harus membuat pelatihan-pelatihan di setiap tahunnya agar pengangguran dapat berkurang dari tahun ke

tahun. Berikut merupakan data awal yang diperoleh dalam beberapa tahun kebelakang tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (BPS, 2024).

Tabel 1. 1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bireuen

| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah pengangguran |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2019 | 2,25% | 4,79% | 3,88 % |
| 2020 | 4,58% | 3,45% | 3,12 % |
| 2021 | 3,86% | 5,01% | 4,32% |
| 2022 | 3,39% | 5,4% | 4,2% |
| 2023 | 4,46% | 3,68% | 4,14% |
| 2024 | 4,15% | 3,62% | 3,93% |

Sumber: BPS kabupaten Bireuen 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah angka pengangguran di Kabupaten Bireuen masih diiringi dengan naik turunnya angka pengangguran setiap tahunnya dimana angka pengangguran di Bireuen mencapai 4,14% pada tahun 2023, di Kabupaten Bireuen yang pengangguran di Tingkat SD, SMP yang lebih banyak pengangguran ditingkat tamatan SMA, dan S1 disebabkan karena terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga jumlah pencari kerja terdaftar menurun sedangkan lapangan kerja selalu terbuka setiap tahunnya tapih pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Hal ini menunjukan penanganan masalah pengangguran dikabupaten bireuen belum efektif

Dinas tenaga kerja sudah menanggulangi angka pengangguran diKabupaten Bireuen dan sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam penanggulangan pengangguran dan sudah membuat program-program pelatihan setiap tahunnya. Berikut merupakan program kegiatan pelatihan kerja yang dibuat oleh Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen dalam penanganan pengangguran.

Tabel 1. 2
Program Kegiatan Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Bireuen Tahun 2024

| No | Jenis program kegiatan | Dana | Lokasi |
|----|---|-----------------|----------|
| 1. | Pembuatan roti/ kue dan pengolahan ikan | Rp. 100.000.000 | UPTD BLK |
| 2. | Menjahit pakaian dengan mesin | Rp. 100.000.000 | UPTD BLK |
| 3. | Design grafis muda dan perakitan computer | Rp. 100.000.000 | UPTD BLK |
| 4. | Servis sepeda motor sitem injeksi | Rp. 100.000.000 | UPTD BLK |
| 5. | Teknis telepon seluler dan pemasangan instansi listrik bangunan sederhana | Rp. 100.000.000 | UPTD BLK |
| 6. | Perabot | Rp. 100.000.000 | UPTD BLK |

Sumber: Dinasketrans Kabupaten Bireuen 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pelatihan kerja sudah dilakukan oleh Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen disetiap tahunnya di UPTD BLK di Gampong Bunyot Kecamatan Juli, setiap kegiatan itu ada 16 orang yang mengikuti pelatiha tersebut dengan jangka waktu pelatihan 30 hari, dana yang dikeluarkan Rp. 100.000.000 setiap jenis kegiatan, dana tersebut ada dari APBN dan APBK. Program kegiatan tersebut ada dari program kegiatan dari APBN itu dibuat pendaftaran secara online ada dibuka link, kalau kegiatan dari APBK itu direkrut dari musrembang permintaan dari desa.

Namun pelaksanaan tersebut dilapangan masih menunjukan kurang maksimalnya kinerja Dinas tenaga kerja tersebut dimana masih banyak masyarakat yang kurang tahu terhadap pelatihan tersebut. Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen pada dasarnya sudah berusaha untuk membuat sejumlah kebijakan dengan tujuan untuk menanggulangi angka pengangguran, namun sejumlah kebijakan tersebut banyak yang belum terealisasi dan masih terkendala oleh banyak hal dimana masih ada masyarakat yang kurang minat

terhadap kegiatan dan kurangnya sarana dan parasaran dan juga masih ada program yang belum dapat terealisasi dan belum berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Responsivitas Penanganan Pengangguran di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bireuen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana responsivitas penanganan pengangguran di Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen?
2. Apa hambatan penanganan pengangguran di Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Dari permasalahan dan latar belakang diatas, untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini perlu ditetapkan fokus penelitian, agar diperoleh informen dan data yang jelas terhadap aspek-aspek yang harus diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Responsivitas penanganan pengangguran di Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen yang berfokus pada: sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari masyarakat, tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas tenaga kerja dalam penanganan pengangguran meliputi kurangnya partisipasi masyarakat terhadap informasi tentang usaha kerja dan kesediaan sarana dan prasarana

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Mengacu pada rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui responsivitas penanganan pengangguran di Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen yang berfokus pada: sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari masyarakat, tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan penanganan pengangguran di Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen meliputi kurangnya akses masyarakat terhadap informasi tentang usaha kerja dan kesediaan sarana dan prasarana.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademisi hasil penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan/masukan/informasi bagi instansi, dan untuk mengetahui responsivitas penanganan pengangguran di Dinas tenaga kerja Kabupaten Bireuen, serta hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas tenaga kerja kabupaten biereun dalam hal pelaksanaan penanganan pengangguran sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bireuen dan mendapatkan informasi yang efesien terhadap masyarakat